



## Pranatan Anyar



KR-Antara/Siswoidodo/aww

**KERETA MEDIK DARURAT: Petugas memeriksa bagian dalam Kereta Rel Listrik (KRL) yang dimodifikasi menjadi Kereta Medik Darurat di PT INKA (Persero) Madiun, Jawa Timur, Kamis (21/1). PT INKA (Persero) memodifikasi tiga rangkaian KRL masing-masing terdiri delapan kereta menjadi Kereta Medik Darurat yang akan digunakan sebagai Rumah Sakit Lapangan untuk keperluan ruang isolasi bagi pasien positif Covid-19, seiring terus meningkatnya kasus positif Covid-19. Penempatan kereta tersebut akan dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19 Jawa Timur.**

## Dana Desa untuk Penanganan Covid-19

**TEMANGGUNG (KR)** - Dana Desa yang diterima desa harus dipergunakan untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19, sehingga pandemi segera berlalu. Karena itu, Pemkab Temanggung akan memeriksa item dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) guna memastikan program tersebut.

"Kami akan periksa RAPBDes atau Perencanaan Pembangunan Desa. Harus ada alokasi untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di tingkat desa. Yang belum dialokasikan harus dimasukkan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Gema Artisti Wahyudi, Kamis (21/1).

Gema mengatakan, pencegahan dan penanganan Covid-19 tersebut di antaranya untuk kegiatan adaptasi kebiasaan baru pada masyarakat desa, sebab sekarang masih pandemi Covid-19. Jadi adanya kegiatan-kegiatan itu agar pande-

mi segera berlalu.

Disampaikan, penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2020 yang intinya untuk pemulihan ekonomi. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung 10 SDGs Desa, antara lain desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, keterlibatan perempuan desa, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan juga masih ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk 12 bulan," katanya.

Selama ini, kata Gema, alokasi Dana Desa sudah untuk penanganan Covid-19. Pada 2021 diharapkan ada peningkatan kinerja di tingkat desa untuk mendukung penanganan tersebut, mengingat desa ada di tingkat terbawah yang berhubungan langsung dengan warga. (Osy)-d

## DISIAPKAN, REGULASI PROGRAM MANDIRI 3.000 RS Layani Vaksinasi Covid-19

**JAKARTA (KR)** - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah memiliki 3.000 rumah sakit yang akan digunakan untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

"Untuk melakukan vaksinasi itu kita punya 3.000 rumah sakit," kata Airlangga dalam press briefing Program 3T, Gerakan Donor Plasma, UMKM Digital, serta Bantuan dan Solidaritas yang diselenggarakan secara virtual oleh BNPB di Jakarta, Kamis (21/1).

Airlangga mengatakan, selain menyediakan 3.000 RS, Pemerintah juga mengerahkan 3.000 vaksinator untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. "Jadi kalau rata-rata 30 pasien perhari, maka bisa 1 juta perhari dilakukan vaksinasi," katanya.

Kemampuan untuk melaksanakan

vaksinasi Covid-19 tersebut, katanya, harus dibarengi ketersediaan vaksin, dan pada akhirnya upaya vaksinasi Covid-19 dilakukan untuk mencapai kekebalan masyarakat yang ditargetkan bisa dicapai dalam waktu satu tahun setelah 70 persen masyarakat divaksin.

Airlangga juga menyampaikan, Pemerintah sedang menyiapkan regulasi terkait vaksinasi Covid-19 secara mandiri, yang dapat dilakukan industri atau perusahaan terhadap karyawannya. Regulasi tersebut akan mengatur tentang sektor-sektor industri tertentu untuk vaksinasi mandiri, termasuk juga hal-hal tek-

nis lainnya seperti sumber vaksin. "Vaksinasi itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis juga," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, sumber vaksin untuk program mandiri akan berbeda dengan program vaksinasi gratis sebelumnya. "Beberapa hal yang berkaitan dengan teknis akan dipersiapkan, juga dan dimintakan sumber vaksinnya berbeda dengan yang gratis," ujarnya.

Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) menuturkan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri ini untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi terhadap masyarakat Indonesia.

Presiden Joko Widodo telah memberi sinyal mengenai kemungkinan dilaksanakannya vaksinasi Covid-19 secara mandiri. (Ant)-d

## VAKSINASI TAHAP I, FEBRUARI SELESAI

## Capaian Sleman dan Yogya 15 Persen

**YOGYA (KR)** - Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Tahap I terhadap sumber daya manusia kesehatan (SDMK) di DIY ditargetkan selesai pada Februari 2021. Vaksinasi Tahap I Termin I di DIY yang dimulai di Kota Yogyakarta sudah berjalan 15,26 persen dan Kabupaten Sleman mencapai 15,06 persen dari sasaran vaksinasi masing-masing pada Rabu (20/1).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Pembajun Setyaningastutie menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Tahap I dibagi menjadi dua termin sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. Vaksinasi Tahap I Termin I dilaksanakan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mulai Kamis (14/1) lalu, selanjutnya vaksinasi Termin II diharapkan di tiga kabupaten lainnya yaitu Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo.

"Jika distribusi vaksin Sinovac sudah masuk DIY seluruhnya, maka vaksinasi Covid-19 Tahap I bagi SDM Kesehatan bisa langsung terlaksana dan selesai Februari 2021. Dari laporan Dinkes Kota Yogya dan Dinkes Sleman, vaksinasi telah berjalan dan mencapai 15 persen," ujar Pembajun kepada KR, Kamis (21/1).

Pembajun mengakui, muncul permasalahan terkait aplikasi untuk proses administrasi vaksinasi. Misalnya SDM Kesehatan sebagai calon penerima vaksin usai mengirimkan data seharusnya mendapatkan SMS blast vaksinasi, tetapi justru banyak yang tidak menerimanya. Karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan kebijakan tidak perlu menunggu SMS blast, namun harus tetap mendaftarkan diri melalui beberapa channel sampai menerima

undangan vaksinasi berupa e-ticket.

"Masalah dalam alur pendataan dan registrasi vaksinasi Covid-19 ini memang masih banyak menemui kendala, karena memang sistemnya masih baru dan digunakan di seluruh daerah. Artinya kita semua masih dalam proses belajar dan menyesuaikan alur vaksinasi. Saya akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan perihal e-ticket ini untuk merujuk calon penerima di Fasyankes yang akan melaksanakan vaksinasi," terangnya.

Meski masih banyak permasalahan, Pembajun menyampaikan, pihaknya berupaya mencari solusi. Dinkes DIY juga masih menunggu distribusi vaksin Sinovac Tahap II, tetapi setidaknya tambahan vaksin untuk Tahap I Termin II akan datang pekan ini. (Ira/Ria)-d

## PRESIDEN MEMASTIKAN

## Bansos dan Insentif UMKM Jalan Terus

**JAKARTA (KR)** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bantuan sosial dan sejumlah insentif lain bagi masyarakat terdampak pandemi serta para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) akan terus bergulir di tahun 2021 ini.

Hal tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam jangka pendek untuk menghadapi masa pandemi Covid-19.

"Akan kita teruskan yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk yang tidak mampu. Kemudian yang berkaitan dengan bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah entah itu insentif pajak atau bantuan modal darurat," ujar Presiden Jokowi secara virtual di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/1).

Menurut Kepala Negara, Pemerintah juga akan memberikan per-

hatian bagi masyarakat yang terkena dampak keputusan hubungan kerja melalui salah satu program pemerintah, Kartu Prakerja. Semua program dan upaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan beban yang dirasakan oleh mereka yang terdampak pandemi saat ini.

Sementara dari sisi penanganan kesehatan, Presiden menegaskan, kedisiplinan terhadap protokol kesehatan masih menjadi strategi utama bagi penanganan pandemi yang juga

menjadi upaya jangka pendek Pemerintah.

"Gubernur, bupati, walikota, camat, lurah, RT dan RW-nya harus berbicara kepada rakyat kita betapa penting yang namanya disiplin terhadap protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan," tandas Presiden.

Kedisiplinan tersebut juga akan diikuti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan membenahi persoalan *testing, tracing, treatment* sebagai salah satu bagian dari upaya penanganan di bidang kesehatan.

Terkini, Pemerintah telah memulai pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 secara gratis yang pada Tahap I memprioritaskan para tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. (Sim/Lmg)-d



KR-Antara/Akbar Tado

**AIR BERSIH PENGUNGS: Sejumlah pengungsi antre mengambil air bersih di tempat pengungsian di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (21/1). Setelah gempa bumi Sulbar berkekuatan Magnitudo 6,2 yang terjadi Jumat (15/1) lalu, kebutuhan air bersih di tempat tersebut masih tercukupi.**

## GeNose Akan Jadi Andalan Terapkan 3T

**JAKARTA (KR)** - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto kembali menekankan pentingnya 3T (Trecing, Testing dan Treatment) dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Hadirnya GeNose, alat pendeteksi Covid-19 dari UGM, akan sangat membantu pelaksanaan 3T tersebut.

Demikian dikemukakan Airlangga dalam Siaran Pers Virtual, Kamis (21/1). Menurutnya, kemampuan untuk menangani, sangat tergantung dari produksi GeNose nantinya. "Kita tunggu kapasitas produksi dari GeNose ini," ujar Airlangga.

Menurut penemu GeNose, Prof Dr Kuwat Triyana alat bekerja dengan mengambil sampel hembusan napas. Kemudian mengidentifikasi virus Korona dengan cara mendeteksi Volatile Organic Compound (VOC). VOC terbentuk lantaran adanya infeksi Covid-19 yang keluar bersama napas.

Orang-orang yang akan diperiksa menggunakan GeNose, terlebih dahulu diminta mengembuskan napas ke tabung khusus. Sensor-sensor dalam tabung itu lalu bekerja mendeteksi VOC. Kemudian, data yang diperoleh akan diolah dengan bantuan kecerdasan buatan hingga memunculkan hasil.

Dalam waktu kurang dari 2 menit, GeNose bisa mendeteksi apakah seseorang positif atau negatif Covid-19. Tingkat akurasi GeNose telah melalui uji profiling dengan menggunakan 600 sampel data valid di Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Lapangan Komus Covid-19 Bambanglipuro, Yogyakarta. (Jon)-f

## KNKT LANJUTKAN PENCARIAN MEMORI CVR Operasi SAR SJ-182 Resmi Dihentikan

**JAKARTA (KR)** - Operasi SAR gabungan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu, resmi dihentikan. Selanjutnya akan dilaksanakan operasi lanjutan berupa pemantauan dan monitoring secara aktif.

Keputusan penghentian SAR gabungan SJ-182, disampaikan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito di JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (21/1). "Hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, pada pukul 16.57 WIB, operasi pencarian dan pertolongan pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu secara resmi saya nyatakan ditutup atau penghentian," kata Bagus.

Bagus menjelaskan, operasi SAR gabungan yang melibatkan Basarnas, TNI, Polri, kementerian/lembaga, potensi SAR, telah berlangsung selama 13 hari. Operasi dengan mengerahkan 4.500 personel, 62 kapal laut, 15 pesawat tersebut diperpanjang dua kali masing-masing 3 hari.

Dalam kegiatan tersebut, tim telah berhasil menemukan atau mengevakuasi 324 kantong jenazah yang berisi bagian tubuh korban, serpihan kecil pesawat sebanyak 68, dan FDR pada hari keempat pada 12

Januari, serta bagian dari casing CVR pada 15 Januari atau hari ketujuh. "Sementara informasi dari tim DVI, dari 324 kantong jenazah yang sudah teridentifikasi ada 43 dan menyusul 7 akan segera diumumkan," ujar Bagus.

Dalam operasi SAR gabungan, dia mengungkapkan tim SAR telah melaksanakan upaya maksimal, bekerja siang dan malam untuk mencari dan mengevakuasi korban maupun bagian atau potongan dari tubuh pesawat, termasuk black box. Hasil-hasil temuan berupa material sudah diserahkan ke KNKT dan untuk korban atau bagian tubuh korban sudah diserahkan kepada DVI.

Memasuki hari terakhir perpanjangan kedua, lanjut Bagus, telah dilakukan evaluasi operasi pencarian dan pertolongan dengan semaksimal mungkin. "Setelah melalui pertimbangan teknis, hasil temuan korban, efektivitas, pertemuannya beberapa kali dengan pihak keluarga korban, masukan-masukan dari unsur di lapangan, dan terakhir tadi kita melaksanakan rapat yang dipimpin menteri perhubungan, secara resmi saya nyatakan operasi SAR ditutup atau penghentian." (Imd)-d

## DPR RI Resmi Setujui Listyo Sigit Kapolri

**JAKARTA (KR)** - Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (21/1) menyetujui rekomendasi Komisi III DPR terkait pengisian jabatan Kepala Kepolisian Negara RI. Lewat uji kepatutan dan kelayakan, Komisi III menerima usulan Presiden Joko Widodo mengangkat Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan menerima pemberhentian Jenderal Pol Idham Azis.

"Perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin sidang pengesahan tersebut. "Setuju," jawab anggota Dewan.

Puan didampingi empat wakilnya, yakni Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rahmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. Puan mengumumkan rapat paripurna dihadiri oleh 91 anggota secara fisik dan 204 orang secara virtual. "Izin empat puluh tujuh orang, sehingga kehadiran sudah mencapai kuorum 342 anggota," katanya. Sebelum sampai pada persetujuan pengangkatan dan pemberhentian ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri Listyo Sigit.

Sahroni mengemukakan Komisi III menyetujui calon Kapolri yang diusulkan Presiden Joko Widodo. "Kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri merupakan prasyarat mutlak menjadi Kapolri. Atas dasar itu Komisi III DPR RI menyetujui calon Kapolri yang diusulkan Presiden Republik Indonesia," kata Sahroni. (Edi/Sim)-f